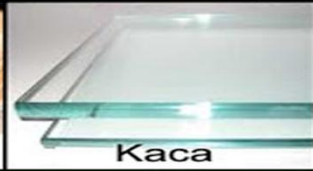
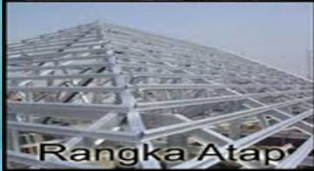


INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KOTA BANDA ACEH 2012



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012

Katalog BPS : 7102025.1171
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : vii + 53 halaman

Naskah:

Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Banda Aceh

Gambar Kulit:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS
Kota Banda Aceh

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

**INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2012**

<http://aceh.bps.go.id/>

KATA PENGANTAR

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerahnya masing-masing sebagai bagian dari perwujudan keberhasilan pembangunan nasional. Namun, ketersediaan dana sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, dan oleh karenanya sumber pendapatan daerah kabupaten/kota yang utama adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Agar pembagian DAU ke daerah kabupaten/kota menjadi adil, proporsional dan merata, diperlukan dukungan data dasar yang valid, akurat dan terkini. Kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan beberapa komponen, salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Untuk itu, dengan diterbitkannya publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh Tahun 2012 ini, diharapkan agar bahan perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan yang lebih baik dan terarah dapat diwujudkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan dan penerbitan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh Tahun 2012. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data.

Banda Aceh, Agustus 2013
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Banda Aceh

Surya Adi Taufik, S.Sos
NIP. 19590403 198003 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Kegunaan	11
BAB 2. METODOLOGI	13
2.1. Ruang Lingkup	14
2.2. Kegiatan Pengumpulan Data	15
2.3. Kuesioner yang Digunakan.....	16
2.4. Identifikasi Kualitas Barang.....	17
2.5. Konsep dan Definisi	18
2.6. Metodologi.....	20
2.6.1. Kelompok Jenis Bangunan.....	20
2.6.2. Data Penunjang Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi	23
2.6.3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	26
BAB 3. Statistik IKK	31
3.1. Keadaan Geografis.....	32
3.2. Penduduk	34
3.3. Keuangan Daerah.....	35
3.4. Potensi Ekonomi	36
3.5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Banda Aceh Tahun 2012	40
3.6. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh dengan kabupaten/kota Lain	41
BAB 4. KESIMPULAN	45
4.1. Kesimpulan	46
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Beberapa Kemungkinan Penghitungan Celah Fiskal dan Dana Alokasi Umum	10
Tabel 2. Besar Inflator Indeks Kemahalan Konstruksi, 2004-2009 ..	26
Tabel 3. Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), 2003-2012	27
Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Banda Aceh, 2012 .	35
Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2012.....	36
Tabel 6. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi, 2011 - 2012	38
Tabel 7. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2012	42

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004	4
Gambar 2. Tahapan Formulasi Dana Alokasi Umum	9
Gambar 3. Peta Wilayah Kota Banda Aceh	33
Gambar 4. Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh	34
Gambar 5. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kota Banda Aceh (Juta Rupiah), 2011-2012	39
Gambar 6. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2012.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Hasil Survei Serentak Khusus Barang Konstruksi 2012 di Kota Banda Aceh.....	48
Lampiran 2. Hasil Survei Diagram Timbang 2012 di Kota Banda Aceh.....	51
Lampiran 3. Daftar Paket Komoditas Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2012	52
Lampiran 4. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia, 2012	53

<http://aceh.bps.go.id/>

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Kegunaan

<http://aceh.bps.go.id/>

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan nasional Indonesia, dewasa ini pemerintah menempuh kebijakan Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar daerah melalui pemerataan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, sebagian besar urusan Pemerintahan Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi sangat strategis. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada 1 Januari 2001, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerahnya sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama beberapa tahun terakhir, DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah, begitu juga untuk Kota Banda Aceh. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata. Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari dua komponen yaitu Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF) dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus Formula DAU

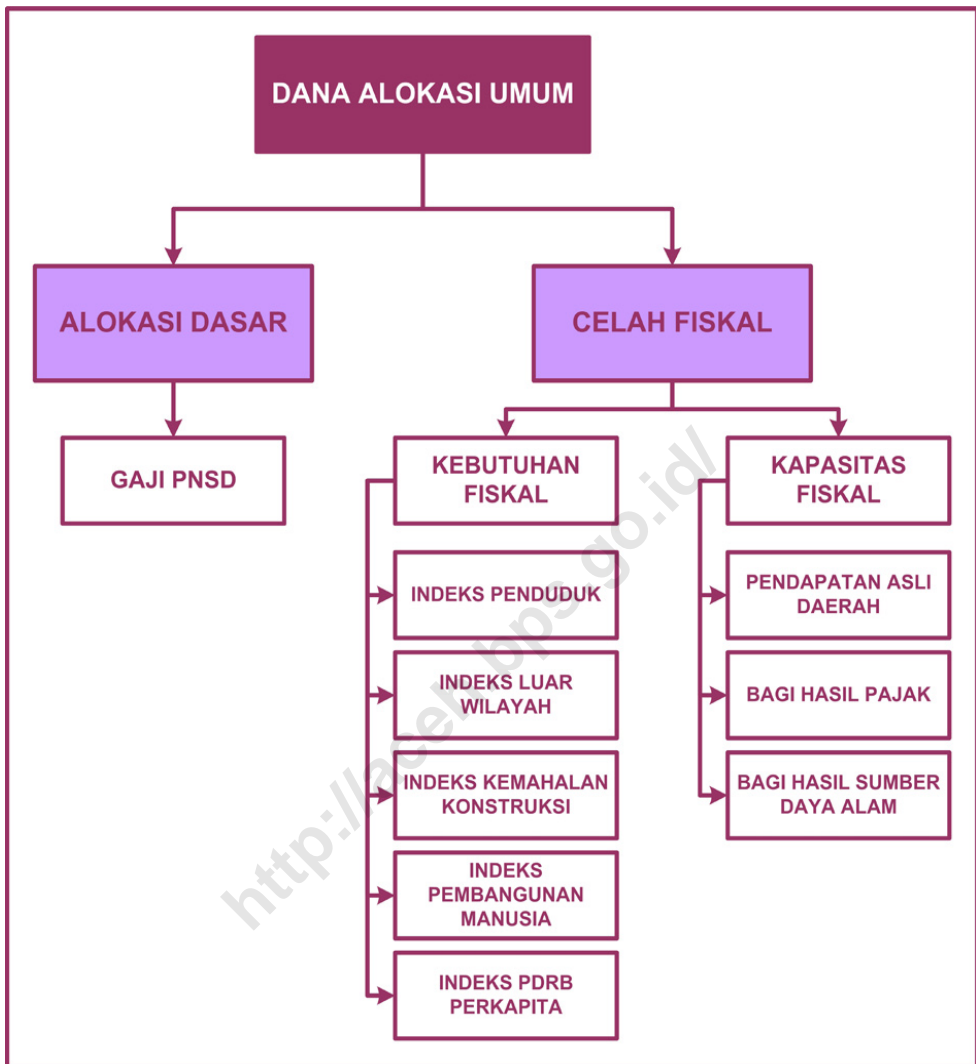
$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

dimana :

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Gambar 1. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004



Alokasi Dasar

Pada pasal 27 ayat 4 disebutkan bahwa Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, berbeda dengan formula Dana Alokasi Umum berdasarkan Undang-Undang

Nomor 25 tahun 1999 yang terdiri dari belanja pegawai dan lumpsum. Penghitungan Alokasi Dasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 didasarkan atas :

- Realisasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah
- kenaikan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan PPh pasal 21 dengan rata-rata 15%
- Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional dan Struktural
- Tingkat Pertumbuhan (Accres) 2,5%
- Gaji Bulan ke-13
- Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pada UNDANG-UNDANG Nomor 33 tahun 2004, komponen belanja hanya belanja pegawai sipil daerah. Komponen belanja pegawai untuk masing-masing daerah (misal daerah A) dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$\text{Alokasi DAU dari komponen belanja pegawai daerah A} \times \text{Total alokasi DAU dari komponen belanja pegawai}$$

Celah Fiskal (CF)

Celah fiskal merupakan selisih dari **kebutuhan fiskal** dan **kapasitas/potensi fiskal** daerah tersebut.

Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal daerah secara umum mengindikasikan perkiraan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur dengan variabel-variabel berikut :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Indeks Kemahalan Konstruksi
4. Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita
5. Indeks Pembangunan Manusia

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, maka dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan penyedia data untuk empat komponen (kecuali luas wilayah) dari lima komponen kebutuhan fiskal tersebut.

Jumlah penduduk mencerminkan tingkat kepadatan suatu wilayah dan menjadi penimbang bagi pemerintah dalam menjalankan program-

program pembangunan. Konsep penduduk yang dimaksud adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan suatu wilayah yang direpresentasikan dalam tiga dimensi yaitu usia hidup (*longevity*) atau kesehatan, pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living standards*).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Besarnya nilai PDRB pada masing-masing sektor ekonomi menggambarkan sejauh mana ketergantungan suatu daerah terhadap salah satu sektor ekonomi. Selain itu, PDRB juga dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang dapat dilihat berdasarkan besarnya angka pertumbuhan ekonomi.

IKK adalah indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi/Harga Bangunan (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi dengan TKK rata-rata nasional. IKK dapat mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur, dimana semakin sulit letak geografis suatu daerah maka harga bahan bangunan di daerah tersebut semakin tinggi. Perbedaan kondisi geografis dan jarak antar daerah menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan dalam pembangunan tersebut. Hal

inilah yang menjadi dasar digunakannya Indeks Kemahalan Konstruksi untuk penyesuaian kebutuhan daerah dilihat dari sektor bangunan/konstruksi.

Mengingat pentingnya ketersediaan data komponen penentu besarnya nilai DAU yang valid dan mutakhir, menjadi sangat krusial bagi setiap daerah termasuk Kota Banda Aceh untuk dapat menyajikan data keempat komponen tersebut, salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh tahun 2012.

Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan, berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
3. Dana Bagi Hasil (DBH) SDA

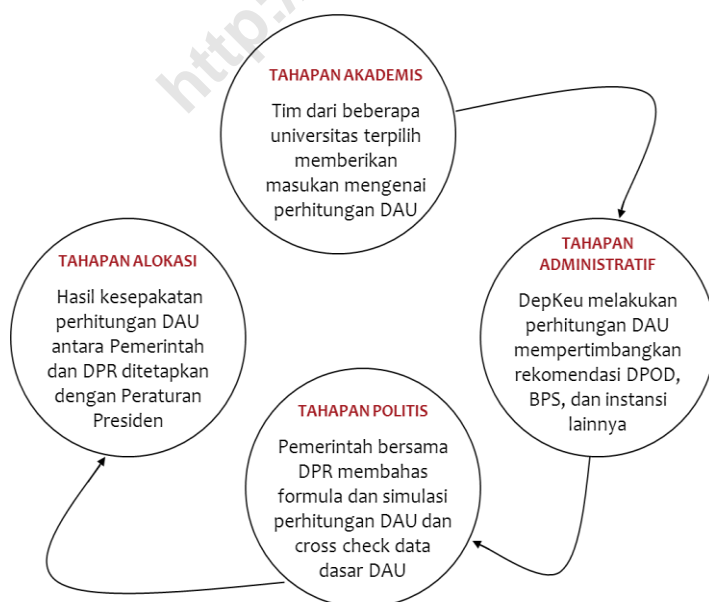
Pengalokasian DAU berdasarkan formula dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} CF &= \text{Kebutuhan Fiskal (K}_{bf}) - \text{Kapasitas Fiskal (K}_{pf}) \\ K_{bf} &= TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB/\text{kapita}) \\ K_{pf} &= PAD + DBH \text{ Pajak} + DBH \text{ SDA} \end{aligned}$$

dimana:

CF	= Celah Fiskal
K_{bf}	= Kebutuhan Fiskal
TBR	= Total Belanja Rata-Rata APBD (realisasi 2011)
IP	= Indeks Jumlah Penduduk (BPS, Juni 2012)
IW	= Indeks Luas Wilayah (Depdagri dan Bakosurtanal, 2010)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2011)
IKK	= Indeks Kemahalan Konstruksi (BPS, 2012)
IPDRB	= Indeks PDRB Perkapita (BPS, 2011)
α	= Bobot Indeks
K_{pf}	= Kapasitas Fiskal
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DBH Pajak	= Dana Bagi Hasil Pajak
DBH SDA	= Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Gambar 2. Tahapan Formulasi Dana Alokasi Umum



Kebijakan *hold harmless* atau alokasi DAU yang tidak boleh lebih rendah dibandingkan DAU sebelumnya yang tidak berlaku lagi sejak tahun 2008 berdampak pada perolehan DAU yang sepenuhnya berdasar formula DAU (penghitungan DAU murni). Sehingga dalam mengatasi ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah, ada beberapa kemungkinan penghitungan celah fiskal maupun DAU.

Tabel 1. Beberapa Kemungkinan Penghitungan Celah Fiskal dan Dana Alokasi Umum

ALTERNATIF	ALOKASI DASAR	CELAH FISKAL	JUMLAH DAU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AD	>0	AD+CF
2	AD	0	AD
3	AD	<0 $<AD$	AD-CF
4	AD	<0 atau $\geq AD$	0

1. Apabila Celah Fiskal positif ($CF > 0$) atau kebutuhan fiskal lebih besar dari pada kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah dengan nilai Celah Fiskal.
2. Apabila Celah Fiskal sama dengan nol ($CF = 0$) atau kebutuhan fiskal sama dengan kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar.
3. Apabila Celah Fiskal negatif ($CF < 0$) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal lebih kecil dari

alokasi dasar, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar dikurangi dengan nilai celah fiskal.

4. Apabila Celah Fiskal negatif ($CF < 0$) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka hasil penghitungan DAU adalah nol atau negatif. Untuk kasus negatif akan disesuaikan menjadi nol yang berarti daerah tidak menerima DAU.

1.2. Kegunaan

Dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah hendaknya mampu melaksanakan pembangunan secara merata dan terarah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kinerja pemerintah. Semakin baik kinerja pemerintah maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh tahun 2012 diharapkan dapat menjadi *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis Kota Banda Aceh, karena semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga barang konstruksi di daerah tersebut. Dengan demikian, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan IKK bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu dilakukan analisis untuk melihat secara utuh berbagai aspek tentang IKK seperti:

1. Metode penghitungan IKK 2012.
2. Peranan IKK dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh tahun 2012 terhadap kabupaten/kota secara Nasional.

Adapun maksud dan kegunaan pengukuran IKK Kota Banda Aceh tahun 2012 itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2012 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan DAU untuk pengalokasian anggaran tahun 2012.
2. Sebagai alat ukur tingkat kemahalan harga bangunan dan perbandingan tingkat kesulitan geografis dengan kabupaten/kota lainnya.
3. Membantu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan konstruksi di Kota Banda Aceh.
4. Sebagai standarisasi harga khususnya barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, sehingga dapat ditentukan kewajaran suatu anggaran proyek oleh tim pembahas anggaran proyek.

2. METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

2.2 Kegiatan Pengumpulan Data

2.3 Kuesioner yang Digunakan

2.4 Identifikasi Kualitas Barang

2.5 Konsep dan Definisi

2.6 Metodologi

2.6.1. Kelompok Jenis Bangunan

2.6.2. Data Penunjang Penghitungan IKK

2.6.3. Indeks Kemahalan Konstruksi

2. METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota tahun 2012 mencakup 491 kabupaten/kota, sedangkan IKK provinsi dihitung di 33 provinsi. Dalam penghitungan IKK kabupaten/kota digunakan data primer dan sekunder.

Data primer yang digunakan dalam penghitungan IKK kabupaten/kota adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Sementara itu, untuk penghitungan IKK Provinsi digunakan data harga rata-rata dari seluruh kabupaten/kota di masing-masing Provinsi. Harga bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan meliputi barang-barang hasil pertambangan/penggalan, barang-barang hasil industri pengolahan dan jasa sewa alat berat.

Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data dari Dinas Pekerjaan Umum dan data dari Bagian Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu realisasi APBD Kota Banda Aceh tahun 2012 dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Dari data APBD tersebut dibuat diagram timbang umum IKK Kota Banda Aceh, dengan cara dipilih pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan konstruksi yang dikelompokkan ke dalam 5 jenis bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal dan bukan

tempat tinggal, bangunan pekerjaan umum untuk pertanian, pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi, serta bangunan lainnya.

2.2 Kegiatan Pengumpulan Data

Pengumpulan data harga rutin dilakukan secara bulanan menggunakan daftar HPB-K2 di 105 kabupaten/kota. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari 60 jenis barang yang mencakup sekitar 145 kualitas barang serta harga sewa empat macam alat berat. Untuk keperluan penghitungan IKK 2012 selain survey HPB-K2, dilakukan pula survei serentak khusus untuk barang-barang konstruksi dan sewa alat berat yang menjadi paket komoditas IKK. Survei ini dilakukan pada bulan Mei 2012 oleh 491 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia. Responden yang menjadi sumber data pada kegiatan survei serentak terdiri dari beberapa kategori yaitu pedagang besar/distributor, pedagang campuran, produsen, pedagang eceran, dan kategori lainnya seperti: kontraktor, Dinas Pekerjaan Umum (Kimpraswil) dan instansi terkait lainnya (khususnya untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat dan upah pekerja/jasa konstruksi).

Pemilihan responden dilakukan secara purposif dengan mengutamakan pedagang besar (PB). Jika pedagang besar tidak ada maka dipilih responden dengan urutan skala prioritas, yaitu dari pedagang campuran, produsen dan pilihan terakhir yaitu pedagang

eceran (PE). Jumlah sampel untuk setiap komoditas adalah 1 hingga 3 responden.

Pengumpulan data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi dan sewa alat berat tersebut diperoleh melalui kegiatan yang disebut Studi Tingkat Kemahalan Konstruksi. Studi ini dilakukan di 20 kabupaten/kota terpilih yang tersebar di 10 provinsi yang dilaksanakan pada bulan April 2003 dan April 2004. Kabupaten/kota dipilih berdasarkan letak dan kondisi geografis serta struktur tanah yang berbeda sehingga data yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan kondisi kabupaten/kota di Indonesia.

2.3 Kuesioner yang Digunakan

Untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan dan sewa alat berat paket komoditas IKK digunakan dua kuesioner/daftar. Daftar ini digunakan untuk mencatat harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi serta Realisasi APBD 2011-2012 yaitu :

1. Daftar VHBK2012-C

Daftar ini digunakan untuk mencatat harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi.

2. Daftar SDT_IKK11

Daftar ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai nilai pengeluaran APBD menurut 5 (lima) kelompok jenis bangunan.

2.4 Identifikasi Kualitas Barang

Agar hasil pengumpulan data harga dalam survei ini sesuai dengan kebutuhan data harga seperti yang tertuang dalam daftar VHBK2012-C, maka perlu dilakukan pemilihan kualitas sebagai berikut:

1. Kualitas terpilih harus kualitas yang telah ditentukan oleh BPS RI, yaitu kualitas umum yang biasanya ada di seluruh kabupaten/kota dan tertulis dalam pilihan daftar VHBK2012-C sebagai pertanyaan tertutup.

Contoh :

Jenis barang : Semen Abu-abu

Kualitas : Tiga Roda 50 Kg, Tiga Roda 40 Kg

2. Apabila kualitas jenis barang atau bahan bangunan/konstruksi tidak ada dalam pilihan dalam kuesioner VHBK2012-C, maka pilih kualitas yang setara dan dominan digunakan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan satuan standard yang tertulis dalam daftar VHBK2012-C dalam isian yang terbuka. Contoh, apabila di daerah pencacahan tidak terdapat data harga cat kayu isi 1 kg dengan kualitas/merk Glotex, maka pilih kualitas yang setara dengan cat kayu Glotex tersebut dengan mengisi isian yang kosong/terbuka yang tersedia. Ukuran kesetaraan ini dapat dilihat dari kualitas/mutu maupun harganya.

2.5 Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ **Harga Perdagangan Besar (HPB)** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara grosir di pasar pertama asal suatu barang.
- ❖ **HPB bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
- ❖ **Pedagang Besar (PB)** adalah pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara grosir atau dalam jumlah besar.
- ❖ **Pedagang Besar Pertama (PB I)** adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil.
- ❖ **Grosir atau dalam jumlah besar** yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif, mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.
- ❖ **Kegiatan Konstruksi** adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat

kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan pembangunan baru. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan-bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Sedangkan kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan.

- ❖ **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah unit/jam.
- ❖ **Excavator** adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke dalam kendaraan truk.
- ❖ **Buldozer** adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek.
- ❖ **Three wheel roller (mesin giling)** adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah atau mengeraskan permukaan jalan.
- ❖ **Mandor** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang.

- ❖ **Kepala Tukang** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.
- ❖ **Tukang batu** adalah buruh yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan water pass.
- ❖ **Tukang kayu** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll.
- ❖ **Tukang cat** adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan, dan dinding lainnya.
- ❖ **Tukang listrik** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik & perlengkapannya dan memasang system listrik generator, trafo, dll.

2.6 METODOLOGI

2.6.1 Kelompok Jenis Bangunan

Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pembangunan baru, perluasan, renovasi/pemugaran, pemeliharaan/perbaikan, pembongkaran, penyiapan lahan (tidak termasuk pembelian lahan/tanah). Penghitungan IKK 2012 menggunakan 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu:

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan.
3. Bangunan lainnya.

Berikut klasifikasi masing-masing kelompok jenis bangunan tersebut:

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal:
 - a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun dan perumahan dinas.
 - b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental lainnya.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan:
 - a. Bangunan jalan dan jembatan dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, pembangunan jalan dan jembatan kereta, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan pelabuhan, meliputi: pembangunan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.
3. Bangunan lainnya:
 - a. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase, irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendalian banjir, tanggul laut, krib, waduk, serta bangunan tempat proses hasil pertanian yang berupa bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
 - b. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi,

meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, transmisi tegangan tinggi, konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi menara pemancar radar *microwave*, bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase pada gedung, pemasangan instalasi pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api dan instalasi listrik lapangan udara, jaringan pipa, jaringan air, dan jaringan minyak.

- c. Bangunan lain selain pekerjaan umum untuk pertanian dan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi, meliputi: bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, serta lapangan parkir.

Dalam penghitungan IKK kabupaten/kota atau Provinsi dibutuhkan beberapa data penunjang, yaitu: paket komoditas, diagram timbang, dan harga bahan bangunan & tarif sewa alat berat yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK.

2.6.2 Data Penunjang Penghitungan IKK

1. Paket Komoditas

Paket komoditas adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena data harganya lebih mudah dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota, serta memiliki andil yang cukup besar yaitu dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi.

Untuk penghitungan IKK tahun 2012 diperkirakan jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas berjumlah 22 terdiri dari 17 jenis bahan bangunan, yaitu: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang dan 4 sewa alat berat, yaitu: *excavator*, *bulldozer*, *three wheel roller* (mesin gilas), *dump truck*, dan upah.

Azas pemilihan paket komoditas adalah :

1. *Comparability* (keterbandingan)
2. *Representativeness* (mewakili)
3. *Trade off comparability vs representativeness*

Selanjutnya tahapan dalam pemilihan paket komoditas IKK adalah :

- Memilih barang dan jasa yang nilainya dominan digunakan pada sektor konstruksi dengan koreksi proxy kesulitan geografis.

- Kualitas barang ditentukan berdasarkan data harga yang dominan masuk dari hasil Survei Serentak tanggal 10-20 April 2012.
- Jika terdapat kesamaan dominasi kualitas barang, maka dilihat koefisien variasi masing- masing kualitas barang tersebut.
- Semakin kecil koefisien variasi kualitas barang, maka semakin kecil perbedaan harganya (homogen).

2. Diagram Timbang (DT) atau Bobot

Diagram Timbang (DT) atau bobot terdiri dari DT kelompok jenis bangunan dan DT umum.

a. Diagram Timbang Kelompok Jenis Bangunan

- Terdiri dari 3 kelompok jenis bangunan;
- Diagram timbang kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan data **kuantitas/volume** bahan bangunan dan jasa yang untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas (m^2) menurut kelompok jenis bangunan/konstruksi;
- Data dalam penyusunan diagram timbang kelompok jenis bangunan bersumber dari table Input-Output dan Dinas Pekerjaan Umum;
- Dengan asumsi bahwa penggunaan (kuantitas/volume) barang untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di masing-masing kabupaten/kota adalah sama, maka diagram timbang kelompok jenis bangunan yang digunakan pun sama untuk seluruh kabupaten/kota.

- Digunakan untuk penghitungan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) per kelompok jenis bangunan.
- **Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK)** merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu besarnya **biaya** yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas (M^2) di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah jenis barang/bahan bangunan dan harga sewa alat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

b. Diagram Timbang Umum

Diagram timbang umum IKK adalah bobot atau andil masing-masing kelompok jenis bangunan yang akan digunakan untuk menghitung IKK umum. Diagram timbang umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Data realisasi APBD ini dapat diperoleh dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk keperluan penghitungan IKK umum kabupaten/kota atau propinsi tahun 2012 digunakan data realisasi APBD tahun 2011. Dari data APBD tersebut dipilih pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik, seperti pembangunan gedung kantor, rumah dinas, jalan, jembatan, lapangan olah raga dan lain-lain kemudian dikelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis bangunan.

3. Harga Bahan Bangunan dan Tarif Sewa Alat Berat

Harga Bahan Bangunan dan Tarif Sewa Alat Berat merupakan harga yang dikumpulkan melalui survei Harga Bahan Bangunan/Konstruksi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia (HPB-K2).

2.6.3 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK rata-rata Nasional. IKK yang semula disebut Indeks Harga Bangunan (IHB) dihitung sejak tahun 2003 atas permintaan Departemen Keuangan RI, dengan rata-rata nasional sebagai acuan (sama dengan 100). Pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK disajikan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang kemudian dikalikan dengan suatu bilangan/inflator yaitu perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) barang-barang konstruksi selama periode pencacahan.

Tabel 2. Besar Inflator Indeks Kemahalan Konstruksi, 2004-2009

Tahun	Inflator	<i>Point to Point</i>
(1)	(2)	(3)
2004	100.00	-
2005	125.10	Feb 2004-Mei
2006	150.92	Feb 2004-Mei
2007	170.17	Feb 2004-April
2008	204.79	Feb 2004-Mei
2009	231.60	Feb 2004-April

Mulai tahun 2010, IKK disajikan dengan model yang berbeda yaitu dengan menentukan salah satu ibukota propinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan. Pada tahun 2010, Kota Balikpapan adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki angka IKK sebesar 100,08 yaitu angka yang paling dekat dengan rata-rata IKK 491 kabupaten/kota sama dengan 100, sehingga Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi akan dipilih sebagai kota acuan. Kota Samarinda sebagai kota acuan pada penghitungan IKK 2010 juga digunakan untuk penghitungan IKK tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3. Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), 2003 – 2012

No	Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Ruang Lingkup : Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah Provinsi	370 30	370 32	440 33	440 33	456 33	457 33	477 33	491 33	491 33	491 33
2	Paket Komoditas : (jumlah barang, sewa alat berat)	22	26	21	22	22	22	21	21	21	21
3	Kelompok Jenis Bangunan	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3

Sesuai dengan pengertiannya IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar atau Indeks Harga Konsumen, kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu lokasi pada periode tertentu dibandingkan terhadap harga tahun dasar.

Berikut perbedaan indeks spasial dan indeks periodikal:

a. Indeks spasial (IKK)

1. Membandingkan harga untuk lokasi berbeda pada waktu yang sama.
2. Dasar/*reference* adalah rata-rata nasional.
3. Jarak/kesulitan antar lokasi/wilayah.
4. Perbedaan struktur harga relatif besar.
5. *Comparability* dan *representative* sulit diperoleh.

b. Indeks periodikal (IHPB)

1. Membandingkan harga untuk lokasi yang sama di waktu yang berbeda.
2. Dasar/*reference* adalah tahun dasar.
3. Perubahan harga antar waktu.
4. Perbedaan struktur harga relatif kecil.
5. *Comparability* dan *representative* mudah diperoleh.

Formula Penghitungan IKK

- a. Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) Kelompok Jenis Bangunan kabupaten/kota $(TKK_{kab})_j$

$$(TKK_{kab})_j = \sum_{i=1}^{21} P_i \cdot Q_{ij}$$

dimana:

i = jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat

j = kelompok jenis bangunan ($j = 1,2,3$)

P_i = harga jenis barang/bahan bangunan i

Q_{ij} = kuantitas/volume bahan bangunan i kelompok jenis bangunan ke- j

- b. Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) Kelompok Jenis Bangunan Rata-Rata Nasional (TKK_{nj})

$$TKK_{nj} = \frac{\sum_{k=1}^{491} TKK_{kab\ j}}{491}$$

dimana:

k = kabupaten/kota (1,2,...,491)

- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kelompok Jenis Bangunan kabupaten/kota $(IKK_{kab})_j$

dimana:

$$IKK_{kab\ j} = \frac{TKK_{kab\ j}}{TKK_{nj}} \times 100$$

d. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Umum kabupaten/kota (IKK_{umum})

k

$$IKK_{kab} = \sum_{j=1}^3 IKK_{kab\ j} \cdot Q'_j$$
$$IKK_{umum\ k} = \frac{IKK_{kab\ k}}{IKK_{kab\ Kota\ Samarinda}} \times 100$$

dimana:

Q'_j = diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

<http://aceh.bps.go.id>

3. STATISTIK IKK

- 3.1. Keadaan Geografis**
- 3.2. Penduduk**
- 3.3. Keuangan Daerah**
- 3.4. Potensi Ekonomi**
- 3.5. IKK Kota Banda Aceh Tahun 2012**
- 3.6. Perbandingan IKK Antar
kabupaten/kota**

3. STATISTIK IKK

3.1. Keadaan Geografis

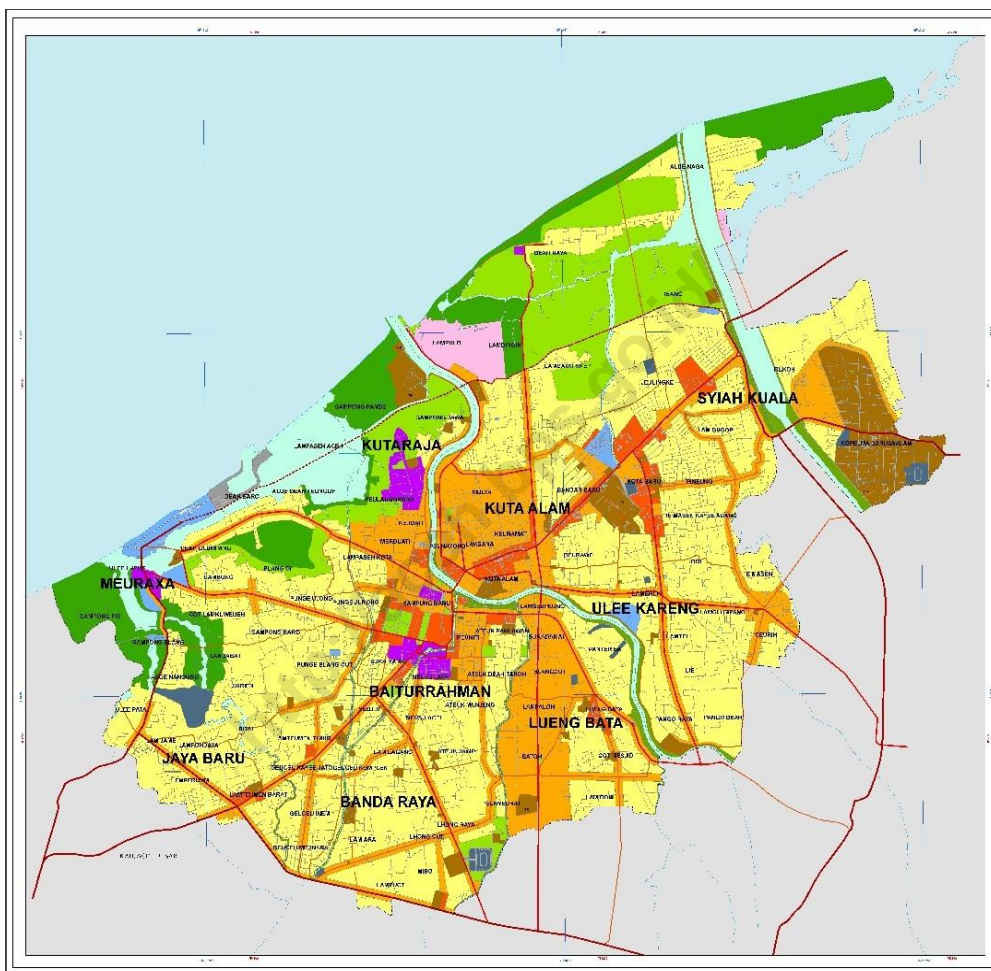
Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh terletak antara 050 16' 15" - 050 36' 16" Lintang Utara dan 950 16' 15" - 950 22' 35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah administratif Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau sekitar 61,36 Km². Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan yang terbagi dalam 90 gampong (desa) serta 17 kemukiman. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Syiah Kuala (14,24 Km²), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru (3,78 Km²).

Wilayah Kota Banda Aceh dikelilingi oleh Kabupaten Aceh Besar yang merupakan batas wilayah Timur dan Selatan. Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Utara dan Samudera Indonesia di sebelah Barat.

Tahun 2012, suhu udara rata-rata di Kota Banda Aceh berkisar 27,2⁰C, lebih panas daripada tahun sebelumnya yang berkisar 26,9⁰C. Curah hujan rata-rata tahun 2012 sebesar 91,47 mm mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 106,5. Kota Banda Aceh mempunyai garis pantai yang panjang, sehingga keadaan suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 68

persen sampai dengan 85 persen dengan kecepatan angin rata-rata mencapai 4,9 knot.

Gambar 3. Peta Wilayah Kota Banda Aceh

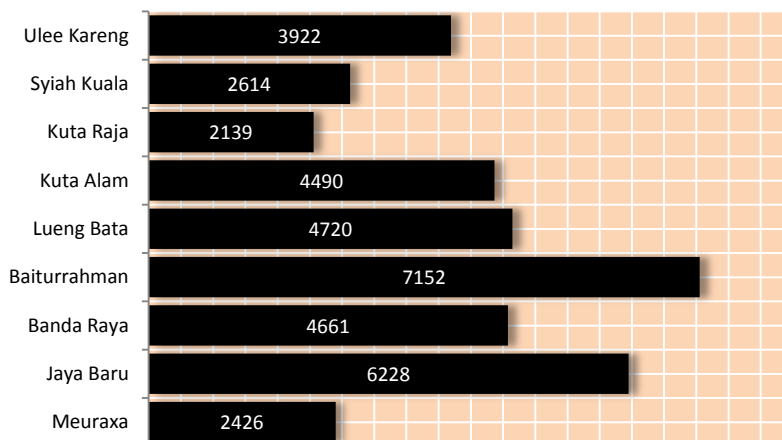


3.2. Penduduk

Penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2012 sebanyak 238.784 jiwa yang terdiri dari 122.874 jiwa penduduk laki-laki dan 115.910 jiwa penduduk perempuan. Kota Banda Aceh mengalami penambahan penduduk sebesar 10.222 jiwa atau sekitar 4,47 persen dari penduduk pada tahun 2011. Jumlah penduduk laki-laki secara umum lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex rasio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2012 untuk setiap 106 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Jumlah rumah tangga di Kota Banda Aceh ialah 58.804, dimana rumah tangga terbanyak terdapat di Kecamatan Kuta Alam yaitu 11.097 dan paling sedikit di Kecamatan Kuta Raja sebanyak 3.147. Kecamatan yang penduduknya terpadat ialah Kecamatan Baiturrahman yaitu 7.152 jiwa/km², sebaliknya Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk yang terendah yaitu 2.139 jiwa/km².

Gambar 4. Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh



3.3. Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi keuangan di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah sehingga tidak terlalu menggantungkan diri pada keuangan pemerintah pusat. Kenyataannya, hampir seluruh daerah di Indonesia masih menggantungkan diri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Banda Aceh, 2012

No (1)	Jenis Penerimaan (2)	Jumlah (3)
A.	Pendapatan Asli Daerah	99.022.803.953
1	Pendapatan Pajak Daerah	38.662.932.308
2	Hasil Retribusi Daerah	14.652.334.236
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	557.943.438
4	Lain-Lain PAD yang dipisahkan	33.726.359.101
5	Zakat	11.423.234.871
B.	Pendapatan Transfer	571.142.021.463
	Dana Perimbangan	560.412.198.867
1	Bagi Hasil Pajak	34.513.156.101
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	7.411.918.766
3	Dana Alokasi Umum	491.593.554.000
4	Dana Alokasi Khusus	26.893.570.000
	Transfer Pemerintah Provinsi	10.729.822.596
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.729.822.596
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0
C.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	117.410.276.561
1	Pendapatan Hibah	0
2	Pendapatan Lainnya	117.410.276.561
	Jumlah Pendapatan Daerah	787.575.101.977

Sumber: Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2012

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh tahun 2012 sebesar Rp.99.022.803.953,-. Sementara itu, DAU dan DAK Kota Banda Aceh tahun 2012 masing-masing sebesar Rp. 491.593.554.000,- dan Rp. 26.893.570.000,-. Pada tahun 2012, realisasi pajak bumi dan bangunan di Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp.4.235.398.325,- atau 101,50 persen dari target yang diharapkan yaitu sebesar Rp.4.174.419.751,-. Rincian realisasi pajak bumi dan bangunan tiap kecamatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2012

Kecamatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Meuraxa	155 823 392	134 562 980	86,40
Jaya Baru	772 801 067	761 889 751	98,60
Banda Raya	954 760 551	1 080 135 986	113,10
Baiturrahman	642 793 849	297 556 257	46,30
Lueng Bata	341 409 283	321 263 878	94,10
Kuta Alam	178 395 735	148 146 664	83,00
Kuta Raja	570 738 168	955 878 037	167,50
Syiah Kuala	117 760 455	106 502 454	90,40
Ulee Kareng	439 937 251	429 462 318	97,60
Jumlah	4 174 419 751	4 235 398 325	101,50

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2012

3.4. Potensi Ekonomi

Dibandingkan tahun sebelumnya, perekonomian Kota Banda Aceh tahun 2012 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh atas dasar

harga berlaku tahun 2011 sebesar 8.992.047,65 juta rupiah yang mengalami peningkatan sebesar 15,00 persen, sehingga menjadi 10.359.381,59 juta rupiah pada tahun 2012.

Secara sektoral, kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan yang terbesar, dimana sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang 33,01 persen bagi perekonomian Kota Banda Aceh. Kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa di urutan kedua sebesar 25,56 persen. Selain itu, pada tahun 2012 Kota Banda Aceh juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 6,17 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 6,02 persen.

Pada tahun 2012, pertumbuhan masing-masing sektor di Kota Banda Aceh mengalami pertumbuhan yang positif. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam kurun waktu 2011-2012 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2011 kontribusi terhadap PDRB sebesar 6,56 persen dan naik menjadi sebesar 8,21 persen pada tahun 2012. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor Konstruksi di Kota Banda Aceh telah berkembang dan menjadi sektor yang potensial. Beberapa sektor lain dengan pertumbuhan tinggi tetapi tetap saja tidak terlalu banyak mempengaruhi nilai PDRB kota Banda Aceh karena kontribusinya yang sangat kecil. Sektor listrik dan air bersih yang mengalami pertumbuhan sebesar 13,28 persen, tetapi kontribusi yang diberikan kurang dari

1 persen (0,79 persen). Sektor industri pengolahan tumbuh sekitar 6,27persen. Kontribusi yang diberikan juga kecil yaitu sebesar 1,93 persen.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi, 2011 – 2012

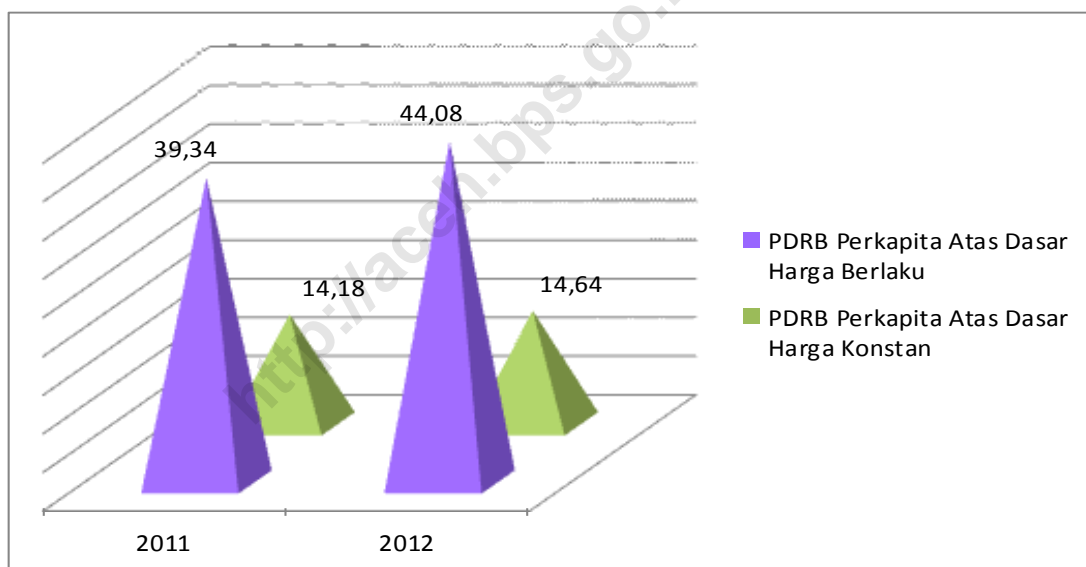
Sektor Ekonomi/ <i>Economic Sector</i>	Pertumbuhan/ <i>Growth (%)</i>		Kontribusi/ <i>Contribution (%)</i>	
	2011*)	2012*)	2011*)	2012*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	4,47	2,66	2,02	1,96
2. Pertambangan & Penggalian	-	-	0,00	0,00
3. Industri Pengolahan	6,00	6,27	1,95	1,93
4. Listrik, Gas & Air Bersih	13,66	13,28	0,78	0,79
5. Konstruksi	6,56	8,21	9,05	10,12
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8,97	10,01	22,73	22,72
7. Pengangkutan & Komunikasi	8,20	8,35	32,66	33,01
8. Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	7,12	8,38	3,86	3,92
9. Jasa-Jasa	3,74	3,21	26,96	25,56
PDRB	6,02	6,17	100,00	100,00

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Banda Aceh 2008-2012

Tabel 6 juga memperlihatkan beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan sekaligus memberikan kontribusi yang besar pada tahun 2012. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 22,72 persen dengan pertumbuhan sebesar 10,01 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 8,35 persen dengan kontribusi yang semakin meningkat menjadi 33,01 persen. Selanjutnya sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 25,56 persen tetapi hanya tumbuh 3,21 persen. Sedangkan,

sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan memberikan kontribusi hanya sebesar 3,92 persen dan tumbuh sekitar 8,38 persen. Sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 1,96 persen dan tumbuh sebesar 2,66 persen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh secara berkesinambungan, pemerintah kota perlu menciptakan iklim investasi yang mendukung dan kondusif.

Gambar 5. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kota Banda Aceh (Juta Rupiah), 2011 – 2012



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Banda Aceh 2008-2012

Bila dilihat dari nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Banda Aceh, secara umum tingkat pendapatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Pada tahun 2011 PDRB perkapita penduduk Kota Banda Aceh sebesar

39,341 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 12,06 persen menjadi 44,087 juta rupiah.

Bila ditinjau dari harga konstan tahun 2000, maka PDRB perkapita penduduk Kota Banda Aceh tahun 2012 mengalami kenaikan hanya sebesar 3,27 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 14,180 juta rupiah di tahun 2011 menjadi 14,645 juta rupiah di tahun 2012.

3.5. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh Tahun 2012

Penghitungan IKK dilakukan pada setiap kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia dengan menggunakan metode jenis barang dan jasa, serta waktu pencacahan yang sama sehingga hasilnya *comparable* untuk menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah se-Indonesia dalam kurun waktu yang sama.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2012 telah dihitung untuk 491 kabupaten/kota dari 33 provinsi di Indonesia, termasuk di antaranya adalah IKK Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. IKK Kota Banda Aceh pada tahun 2012 sebesar 102,79 dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Aceh adalah 91,23. Adapun IKK rata-rata nasional adalah sebesar 103,57 dimana Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai acuan (IKK Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur sama dengan 103,57). IKK Kota Banda Aceh dan IKK Provinsi

Aceh yang berada di bawah IKK rata-rata nasional mencerminkan bahwa akses masyarakat di Kota Banda Aceh dan di Provinsi Aceh secara umum dalam memperoleh bahan-bahan konstruksi masih relatif lebih mudah dan wilayahnya masih relatif lebih terjangkau dibandingkan kabupaten/kota dan provinsi lainnya di Indonesia.

3.6. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh dengan kabupaten/kota Lain

Angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2012 berkisar antara 81 sampai dengan 112. Berdasarkan level provinsi Aceh, IKK Kota Subulussalam dengan nilai sebesar 81,17 adalah IKK dengan indeks terendah, sebaliknya posisi IKK tertinggi ialah Simeulue dengan nilai IKK 112,60. IKK Kota Banda Aceh berada di urutan ke 16 dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Sedangkan untuk level nasional, bila diurutkan dari yang terendah, IKK Kota Banda Aceh berada pada urutan ke 300 dari 491 kabupaten/kota. Nilai IKK terendah untuk level nasional adalah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan indeks 70,58 dan IKK tertinggi adalah Kabupaten Puncak Provinsi Papua dengan indeks 461,52.

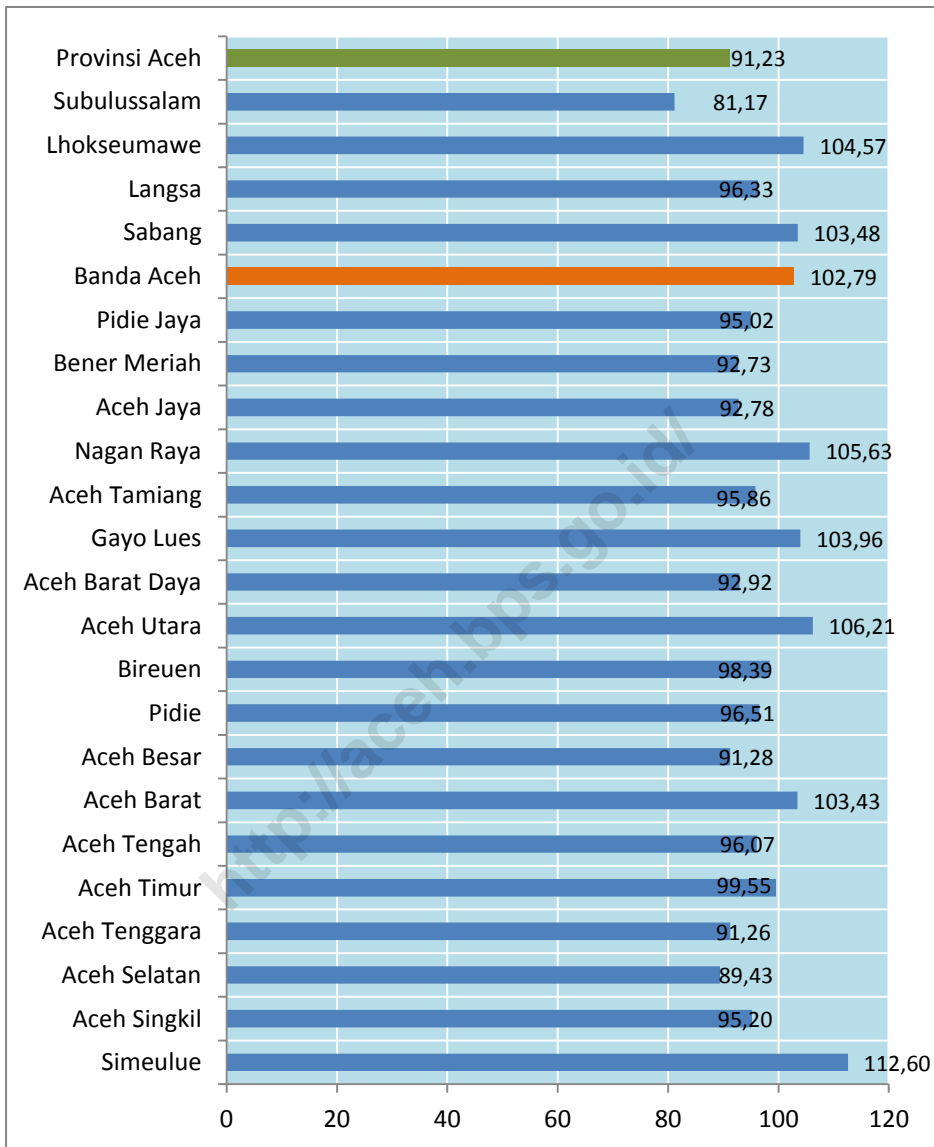
Sementara itu untuk level provinsi, bila diurutkan dari yang terendah angka IKK Provinsi Aceh sebesar 91,23 menempati peringkat ke-14 dari 33 provinsi di Indonesia. IKK provinsi yang tertinggi adalah IKK Provinsi Papua sebesar 242,63 dan IKK terendah adalah IKK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 75,79.

Tabel 7. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2012

No	Kode	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1101	Simeulue	112,60
2	1102	Aceh Singkil	95,20
3	1103	Aceh Selatan	89,43
4	1104	Aceh Tenggara	91,26
5	1105	Aceh Timur	99,55
6	1106	Aceh Tengah	96,07
7	1107	Aceh Barat	103,43
8	1108	Aceh Besar	91,28
9	1109	Pidie	96,51
10	1110	Bireuen	98,39
11	1111	Aceh Utara	106,21
12	1112	Aceh Barat Daya	92,92
13	1113	Gayo Lues	103,96
14	1114	Aceh Tamiang	95,86
15	1115	Nagan Raya	105,63
16	1116	Aceh Jaya	92,78
17	1117	Bener Meriah	92,73
18	1118	Pidie Jaya	95,02
19	1171	Banda Aceh	102,79
20	1172	Sabang	103,48
21	1173	Langsa	96,33
22	1174	Lhokseumawe	104,57
23	1175	Subulussalam	81,17
	1100	PROVINSI ACEH	91,23
Keterangan : Rata-rata Kota Samarinda=100 dan Inflator 1,0357			

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Gambar 6. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2012



Sumber: BPS Provinsi Aceh

Pada tahun 2012, sebagian besar IKK kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan angka lebih rendah dari 100, hanya 8 kabupaten/kota yang memiliki IKK diatas 100 yaitu Simeulue, Aceh Barat, Aceh Utara, Gayo Lues, Nagan Raya, Banda Aceh, Sabang dan Lhokseumawe. IKK terendah senilai 81,17 merupakan IKK Kota Subulussalam dan nilai IKK tertinggi ialah Kabupaten Simeulue senilai 112,60. Disamping itu, angka IKK masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda menunjukkan adanya variasi harga bangunan di masing-masing kabupaten/kota se Provinsi Aceh sebagai dampak dari lokasi yang sulit dan jauh dari pusat-pusat perekonomian.

Sebagai indeks spasial, besaran IKK lebih dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas bahan bangunan antar daerah dibandingkan dengan perkembangan harga antar waktu (*time series*) di suatu daerah. Di daerah-daerah yang jauh dari pusat produksi atau pusat distribusi, harga komoditas pada umumnya lebih mahal. Dengan kata lain, perbedaan harga barang antar daerah berkaitan erat dengan darimana barang tersebut berasal. Sebagian besar barang-barang yang masuk ke Banda Aceh berasal dari wilayah Medan, Sumatera Utara dan beberapa barang berasal dari Banda Aceh sendiri, Aceh Besar dan Padang. Perbedaan harga antar daerah, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti permintaan dan penawaran, juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti jumlah pedagang besar di daerah tersebut dan kondisi jalan yang mempengaruhi jalur distribusi.

4. *PENUTUP*

4.1. Kesimpulan

<http://aceh.bps.go.id/>

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2012 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh sebesar 102,79, lebih rendah dibandingkan IKK rata-rata nasional yaitu IKK Kota Samarinda yang sebesar 103,57.
2. IKK Kota Banda Aceh tahun 2012 berada pada posisi ke 16 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk level provinsi, besaran IKK Provinsi Aceh berada di peringkat ke-14 tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia dimana yang menjadi provinsi acuan adalah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Variasi angka IKK kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan adanya perbedaan biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh.



<http://aceh.pps.go.id/>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Survei Serentak Khusus Barang Konstruksi 2012
di Kota Banda Aceh

No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/Unit	Harga per satuan/unit (Rp)	Nama Daerah Asal Barang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pasir (tanpa ongkos angkut)	Pasir Pasang	m ³	136.000	Aceh Besar
		Pasir Beton / Cor	m ³	200.000	Aceh Besar
		Pasir Urug	m ³	150.000	Aceh Besar
		Lainnya ...Batu Kerikil....(tuliskan)	m ³	200.000	Aceh Besar
2	Batu Pondasi (tanpa ongkos angkut)	Batu Gunung	m ³	200.000	Aceh Besar
3	Batubata	Batubata Merah Manual (60 buah/m ²)	100 buah	27.000	Aceh Besar
4	Batu Split (tanpa ongkos angkut)	Ukuran 1 - 2 cm	m ³	208.889	Aceh Besar
		Ukuran 2 - 3 cm	m ³	500.000	Aceh Besar
5	Semen Abu-abu a. berat isi 40 kg	Lainnya ...Padang... (tuliskan)	40 kg	44.000	Padang
		Lainnya ...Andalas... (tuliskan)	40 kg	45.000	Aceh
6	Pipa PVC	Wavin, kw D, Φ 4" panjang 6 m	batang	135.000	Medan
		kw AW, Φ 4" panjang 6 m	batang	265.000	Medan
		Vinilon, kw D, Φ 4" panjang 6 m	batang	135.000	Medan
		kw AW, Φ 4" panjang 6 m	batang	265.000	Medan
		Wavin, kw D, Φ 4" panjang 5,8 m	batang	155.000	Medan
		kw AW, Φ 4" panjang 6,8 m	batang	295.000	Medan
		Lainnya kw AW ...Starlon... (tuliskan)	batang	195.000	Medan
		Lainnya kw DStarlon.... (tuliskan)	batang	115.000	Medan
7	Seng Plat	Ukuran (0,02 x 90) cm	m	23.000	Medan
		Ukuran (0,03 x 90) cm	kaki	12.500	Medan
8	Seng Gelombang	Ukuran (0,02 x 90 x 180) cm	lembar	37.500	Medan
		Ukuran (0,03 x 90 x 180) cm	lembar	75.500	Medan
		Lainnya (0,02 x 90 x 210) cm (tuliskan)	lembar	44.500	Medan
		Lainnya (0,02 x 90 x 240) cm (tuliskan)	lembar	51.200	Medan
9	Paku	Paku Kayu 5 cm	kg	12.000	Medan
		Paku Kayu 10 cm	kg	12.000	Medan
		Paku Beton Hitam 5 cm	100 buah	5.000	Medan
		Paku Beton Hitam 10 cm	100 buah	15.000	Medan
		Lainnya8 cm..... (tuliskan)	100 buah	10.000	Medan
10	Besi Beton (Full)	Ukuran Φ 10 mm Panjang 12 m	batang	68.500	Medan
		Ukuran Φ 8 mm Panjang 12 m	batang	44.000	Medan
		Ukuran Φ 10 mm Panjang 12 m	kg	9.300	Medan
		Ukuran Φ 8 mm Panjang 12 m	kg	9.300	Medan
11	Keramik Polos Kualitas 1 (KW 1) uk. (40 x 40) cm	Mulia	m ²	48.000	Medan
		Arwana	m ²	48.000	Medan
		Asiatile	m ²	50.000	Medan
		KIA	m ²	49.000	Medan
		Accura	m ²	48.000	Medan
		Diamond	m ²	50.000	Medan
		Hercules	m ²	50.000	Medan
		Ikad	m ²	48.000	Medan
		LainnyaOK....(tuliskan)	m ²	48.000	Medan
		LainnyaRoman.... (tuliskan)	m ²	89.000	Medan

No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/Unit	Harga per satuan/unit (Rp)	Nama Daerah Asal Barang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Kayu Papan	Meranti (2 cm x 20 cm x 4 m)	m ³	4.000.000	Aceh
		Kruing (2 cm x 20 cm x 4 m)	m ³	4.000.000	Aceh
		Lainnya ...Seumantok..... (tuliskan)	m ³	5.000.000	Aceh
13	Kayu Balok	Meranti (5 cm x 10 cm x 4 m)	m ³	4.000.000	Aceh
		Kruing (5 cm x 10 cm x 4 m)	m ³	4.000.000	Aceh
		Lainnya ...Sembarang... (tuliskan)	m ³	3.000.000	Aceh
14	Kayu Lapis	Meranti (0,4 x 122 x 244) cm	lembar	49.000	Medan
		Meranti (0,5 x 122 x 244) cm	lembar	78.000	Medan
		Campuran (0,4 x 122 x 244) cm	lembar	49.000	Medan
		Campuran (0,5 x 122 x 244) cm	lembar	75.000	Medan
		Lainnya ...(0,8 x 122 x 124)... (tuliskan)	lembar	103.000	Medan
15	Cat Tembok Putih a. berat isi 5 kg	Catylac	5 kg	90.000	Medan
		Vinilex	5 kg	90.000	Medan
		Avian	5 kg	38.000	Medan
		Matex	5 kg	125.000	Banda Aceh
		Dulux (cat dalam)	2,5 kg	150.000	Medan
		Belmas	5 kg	400.000	Medan
		LainnyaJotun.....(tuliskan)	2,5 kg	180.000	Medan
	b. berat isi 25 kg	LainnyaKimex.....(tuliskan)	5 kg	65.000	Banda Aceh
		Lainnya ...Dulux - cat luar.... (tuliskan)	5 kg	230.000	Medan
		Catylac	25 kg	450.000	Medan
		Vinilex	25 kg	450.000	Banda Aceh
		Dulux (cat dalam)	25 kg	1.150.000	Medan
		Lainnya ...Dulux - cat luar ..(tuliskan)	25 kg	1.680.000	Medan
16	Cat Kayu / Besi berat isi 1 kg	Avian	1 kg	40.000	Medan
		Glutex	1 kg	45.000	Medan
		Kuda Terbang	1 kg	42.000	Medan
		Dulux	1 kg	42.000	Medan
		Yoko	1 kg	30.000	Medan
17	Kaca Polos Bening	Asahi tebal 3 mm	kaki	6.000	Medan
		5 mm	kaki	7.500	Medan
		Lainnya ...Asahi tebal 8 mm... (tuliskan)	kaki	17.500	Medan

RESPONDEN DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan	Harga per satuan/unit (Rp)	Nama Daerah Asal Barang/Asal Sewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aspal	Curah Grade 60/70 Lokal	ton	7.800.000	Medan
		Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal	drum	1.550.000	Medan
2	Sewa Excavator	100-120 HP	unit/jam	185.000	Banda Aceh
3	Sewa Dump Truck	8 - 10 ton	unit/hari	600.000	Banda Aceh
4	Upah Jasa Konstruksi	Mandor	o-h	65.000	Banda Aceh
		Kepala Tukang	o-h	87.000	Banda Aceh
		Tukang Batu	o-h	75.000	Banda Aceh
		Tukang Kayu	o-h	72.000	Banda Aceh
		Tukang Cat	o-h	72.000	Banda Aceh
		Tukang Listrik	o-h	72.000	Banda Aceh
		Pembantu Tukang	o-h	56.000	Banda Aceh

RESPONDEN PENYEWAAN ALAT BERAT SWASTA/ KONTRAKTOR					
No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan	Harga	Nama Daerah Asal Sewa
				per satuan/unit (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sewa Excavator	100-120 HP	unit/jam	185.000	Banda Aceh
2	Sewa Buldozer	95-120 HP	unit/jam	350.000	Banda Aceh
3	Sewa Three Wheel Roller	8 - 10 ton	unit/jam	100.000	Banda Aceh
4	Sewa Dump Truck	8 - 10 ton	unit/hari	600.000	Banda Aceh
		kurang dari 8 ton	unit/hari	400.000	Banda Aceh
5	Upah Jasa Konstruksi	Mandor	o-h	50.000	Banda Aceh
		Kepala Tukang	o-h	100.000	Banda Aceh
		Tukang Batu	o-h	75.000	Banda Aceh
		Tukang Kayu	o-h	75.000	Banda Aceh
		Tukang Cat	o-h	75.000	Banda Aceh
		Tukang Listrik	o-h	75.000	Banda Aceh
		Pembantu Tukang	o-h	40.000	Banda Aceh

ANALIS TARIF SEWA ALAT BERAT											
ESCAVATOR											
1.	Merk	HITACHI.....	Type	AXIS 200.....							
2.	Tahun pembuatan/perakitan				2	0	0	9	tahun		
3.	Berapa tenaga alat tersebut?					2	0	0	HP		
4.	Berapa konsumsi bahan bakar per jam?			solar/bensin*)			2	5	liter		
5.	Berapa biaya mobilisasi per km?				7	5	0	0	0	rupiah	
6.	Berapa biaya mobilisasi per	alat.....	(sebutkan)?					1	,	5	juta rupiah
BULDOZER											
1.	Merk	KOMATSU.....	Type	D-6.....							
2.	Tahun pembuatan/perakitan				2	0	0	5	tahun		
3.	Berapa tenaga alat tersebut?					1	5	0	HP		
4.	Berapa konsumsi bahan bakar per jam?			solar/bensin*)	3	1	,	2	5	liter	
5.	Berapa biaya mobilisasi per km?				7	5	0	0	0	rupiah	
6.	Berapa biaya mobilisasi per	alat						1	,	5	juta rupiah
DUMP TRUCK											
1.	Merk	Mitsubishi.....	Type	Hercules PS-120.....							
2.	Tahun pembuatan/perakitan				2	0	0	7	tahun		
3.	Berapa tenaga alat tersebut?					1	2	0	HP		
4.	Berapa konsumsi bahan bakar per jam?			solar/bensin*)			5	0	liter		
5.	Berapa biaya mobilisasi per km?								,		juta rupiah
6.	Berapa biaya mobilisasi per			(sebutkan)?					,		juta rupiah
7.	Berapa kapasitas muatan bak truck?						4	,	0	m ³	

Lampiran 2

Hasil Survei Diagram Timbang 2012
di Kota Banda Aceh

Kelompok Jenis Bangunan	2011		2012	
	Nilai (Ribu Rp)	Persentase (%)	Nilai (Ribu Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal	33.201.658.604	89,49	36.355.745	79,54
2. Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian	-	-	-	-
3. Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan dan Pelabuhan	92.475.000	0,25	-	-
4. Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air minum dan Komunikasi	3.807.961.000	10,26	9.354.511	20,46
5. Bangunan Lainnya	-	-	-	-
Total	37.102.094.604	100%	45.710.256	100%

Lampiran 3

Daftar Paket Komoditas Penghitungan
Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2012

No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan	Harga per satuan/unit (Rp)	Asal Barang	
					Kode (4 digit)	Nama Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pasir	Pasir Pasang	m ³	136.000	1108	A. Besar
2	Batu Pondasi	Batu Kali Utuh	m ³	137.000	1108	A. Besar
3	Batubata	Batubata Merah Manual (60 buah/m ²)	100 buah	27.000	1108	A. Besar
4	Batu Split	Ukuran 1 - 2 cm	m ³	208.889	1108	A. Besar
5	Semen Abu-abu	Tiga Roda 50 kg	zak	54.000	1108	A. Besar
6	Pipa PVC	Wavin, kw D, Φ 4" panjang 4 m	batang	90.000	1275	Medan
7	Seng Plat	Ukuran (0,02 x 90) cm	m	23.000	1275	Medan
8	Seng Gelombang	Ukuran (0,02 x 90 x 180) cm	lembar	37.500	1275	Medan
9	Besi Beton (Full)	Ukuran Φ 10 mm Panjang 12 m	batang	68.500	1275	Medan
10	Keramik Polos	Mulia uk. (40 x 40) cm	m ²	48.000	1275	Medan
11	Kayu Papan	Meranti (2 cm x 20 cm x 4 m)	m ³	4.000.000	1108	A. Besar
12	Kayu Balok	Meranti (5 cm x 10 cm x 4 m)	m ³	4.000.000	1108	A. Besar
13	Kayu Lapis	Ukuran (0,4 x 122 x 244) cm	lembar	49.000	1275	Medan
14	Cat Tembok Putih	Catylac 5 kg	kaleng	90.000	1275	Medan
15	Cat Kayu / Besi	Avian 1 kg	kaleng	40.000	1275	Medan
16	Kaca Polos Bening	Mulia tebal 5 mm	m ²	81.675	1275	Medan
17	Aspal	Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal	drum	1.550.000	1275	Medan
18	Sewa Excavator	100-120 HP	unit/jam	185.000	1171	Banda Aceh
19	Sewa Buldozer	95-120 HP	unit/jam	350.000	1171	Banda Aceh
20	Sewa Three Wheel Roller	8 - 10 ton	unit/jam	175.000	1171	Banda Aceh
21	Sewa Dump Truck	8 - 10 ton	unit/jam	600.000	1171	Banda Aceh
22	Upah Jasa Konstruksi	Tukang Batu PU	o-h	75.000	1171	Banda Aceh

Lampiran 4

Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi
di Indonesia, 2012

No	Kode	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	PROV. ACEH	91,23
2	1200	PROV. SUMATERA UTARA	92,49
3	1300	PROV. SUMATERA BARAT	88,16
4	1400	PROV. R I A U	100,82
5	1500	PROV. J A M B I	96,25
6	1600	PROV. SUMATERA SELATAN	94,42
7	1700	PROV. BENGKULU	87,47
8	1800	PROV. LAMPUNG	89,85
9	1900	PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	104,30
10	2100	PROV. KEPULAUAN RIAU	109,81
11	3100	PROV. DKI JAKARTA	93,89
12	3200	PROV. JAWA BARAT	83,11
13	3300	PROV. JAWA TENGAH	79,54
14	3400	PROV. DI YOGYAKARTA	75,79
15	3500	PROV. JAWA TIMUR	81,14
16	3600	PROV. B A N T E N	87,28
17	5100	PROV. B A L I	91,15
18	5200	PROV. NUSA TENGGARA BARAT	78,68
19	5300	PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	85,73
20	6100	PROV. KALIMANTAN BARAT	108,26
21	6200	PROV. KALIMANTAN TENGAH	106,03
22	6300	PROV. KALIMANTAN SELATAN	97,72
23	6400	PROV. KALIMANTAN TIMUR	108,46
24	7100	PROV. SULAWESI UTARA	100,46
25	7200	PROV. SULAWESI TENGAH	81,72
26	7300	PROV. SULAWESI SELATAN	86,51
27	7400	PROV. SULAWESI TENGGARA	96,74
28	7500	PROV. GORONTALO	92,10
29	7600	PROV. SULAWESI BARAT	95,53
30	8100	PROV. M A L U K U	100,52
31	8200	PROV. MALUKU UTARA	108,58
32	9100	PROV. PAPUA BARAT	149,15
33	9400	PROV. PAPUA	242,63

Keterangan : Rata-rata Kota Samarinda=100 dan Inflator 1,0357

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

Jalan Laksamana Malahayati Km 6,5 Desa Baet, Kecamatan Baitussalam
Telp. (0651) 7471216, Fax (0651) 7471216 , email: bps1171@bps.go.id
<http://bandaacehkota.bps.go.id>